Jurnal Ekonomi dan Bisnis
p-ISSN: 1963-0908 | e-ISSN: 2301-6469
J E B I
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PEKALONGAN

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi

INFLASI, UPAH DAN PENGANGGURAN DI KABUPATEN MAJALENGKA (PENDEKATAN *ERROR CORRECTION MODEL*)

L Suparto LM[1*] Pipih Sopiyan[2]
[1,2]Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Majalengka
*Email: lalusuparto@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received: 01 March 2023
Received in revised form: 15 March 2023
Accepted: 25 March 2023

Keywords: *Inflation, Unemployment, Wage*

ABSTRACT

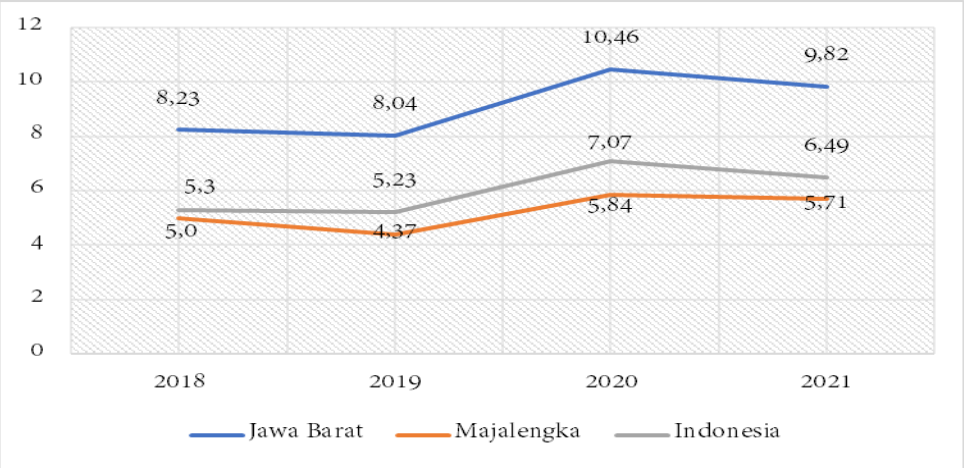
The purpose of this research is to look at the short-term and long-term impacts of inflation and wages on unemployment in Majalengka Regency. The subjects of this research analysis are inflation, wages, and unemployment in Majalengka Regency from 2008 to 2022, this study employs a quantitative approach, meaning the use of numbers. Secondary data were acquired from archives issued by the West Java Province and Majalengka Regency's Central Bureau of Statistics. The Domowitz-El Badawi error correction model was employed in the analysis. According to the findings, inflation has a positive impact on unemployment in the near term but a negative and significant impact on it in the long run. This suggests that inflation remains a concern for the economy, particularly in the short term. The impact of wages on unemployment is negative and considerable both in the short and long terms. This indicates that too high wages may cause the demand for work decline, which would increase unemployment. To keep wages at a level that balances the supply and demand for labor, a collective agreement is thus required between workers, the government, and businesses. This will assist to reduce the long-term detrimental effects of inflation and wages on unemployment.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada, serta kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah daerah, untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan dasar dari setiap pertumbuhan ekonomi adalah untuk meningkatkan kuantitas dan keragaman kesempatan kerja bagi penduduk lokal. Sementara itu, pekerjaan yang lebih kecil dari angkatan kerja akan mengakibatkan pengangguran. Pengangguran yang tinggi pasti menjadi masalah ekonomi jangka pendek dan panjang. (Samuelson A. P., 2014), pengangguran akan menjadi perhatian ekonomi karena pemborosan sumber daya yang berharga, dan pengangguran yang tinggi berarti menyia-nyiakan produksi produk dan jasa yang mampu dihasilkan oleh pengangguran.

Di sisi lain, meningkatnya inflasi dan melambatnya laju pembangunan ekonomi telah meningkatkan proporsi penduduk yang belum dewasa, demikian pula jumlah anggota keluarga, sehingga mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang tidak merata. Seiring laju pembangunan ekonomi yang semakin cepat, penciptaan produk dan jasa juga akan meningkatkan standar hidup. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali akan

meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Sedangkan salah satu elemen yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah tingkat upah (Mankiw, 2019). Upah adalah sejumlah uang yang diberikan kepada suatu unit kerja sebagai kompensasi. Gaji tenaga kerja sangat penting bagi kedua belah pihak. Upah adalah biaya produksi yang harus diminimalkan seefektif mungkin bagi produsen. Upah merupakan sumber penghasilan bagi pegawai dan keluarganya, serta sumber pengeluaran pemerintah. Tinggi rendahnya upah merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Kabupaten Majalengka pada empat tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 sebesar 5,84%. Jumlah tersebut masih dibawah Provinsi Jawa Barat dan Indonesia pada tahun yang sama.



Sumber : BPS Indonesia, diolah.

Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, Tahun 2018-2021 (dalam Persen)

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka baik di tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Majalengka, pada tahun 2018 – 2021 cenderung mengalami fluktuasi dengan pergerakan yang sama. Meningkatnya persentase pengganguran terbuka selama dua tahun terakhir, umumnya disebabkan oleh dampak Covid-19 yang mengakibatkan hampir semua sektor ekonomi lumpuh, karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB), melemahnya konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat sehingga produksi menurun dan pengganguran meningkat.

Tingkat pengangguran terbuka pada dasarnay mengukur kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap pasokan tenaga kerja yang ada. Semakin besar nilai indikator ini, semakin besar jumlah penawaran tenaga kerja yang tidak terpakai. Indikator ini dapat memberikan informasi tentang kinerja pasar tenaga kerja dan perkembangan keadaan ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan sebagainya. Menurut teori siklus ekonomi riil, pengangguran adalah kejadian sementara. Ekonom klasik yang mengajukan gagasan tentang siklus bisnis riil menyatakan bahwa pasar berfungsi dengan daya saing penuh dan dalam persaingan sempurna. Rumah tangga memiliki pengetahuan lengkap tentang pasar tenaga kerja, termasuk keseimbangan upah, permintaan dan penawaran tenaga kerja (Mankiw, 2019). Teori ini mengemukakan bahwa pasar tenaga kerja bersifat fleksibel, dimana upah mudah turun atau naik untuk menyesuaikan penawaran dan permintaan. Namun faktanya, upah tidak serta merta turun

atau naik mengikuti permintaan dan penawaran pasar tenaga kerja. Justru kenaikan upah lebih mudah daripada penurunan upah.

Pada awal Desember 2022 hampir semua pemerintah daerah telah menetapkan penyesuaian atau kenaikan upah minimum provinsi/kabupaten yang sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 yang akan mulai berlaku per 1 Januari 2023 dengan besaran kenaikan yang berbeda – beda di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2023 naik menjadi sebesar Rp. 1.986.670,17. Angka ini naik 7,88 persen atau sebesar Rp.145.183 dari UMP tahun 2022 sebesar Rp 1.841.487. Sedangkan Kabupaten Majalengka tahun 2023 Upah Minimum Kabupaten (UMK) naik menjadi Rp. 2.180.603. Angka ini naik 7,51 persen atau sebesar Rp. 152.984 dari UMK tahun 2022 sebesar Rp. 2.027.619.

Kenaikan upah ini tetap dilakukan oleh pemerintah, di tengah guncangan biaya produksi yang dihadapi oleh hampir semua pengusaha akibat melonjaknya harga minyak dunia sebagai dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina, serta ancaman resesi pada tahun 2023. Tahun 2023 potensi resesi ekonomi global semakin nyata sejalan dengan belum adanya tanda-tanda berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina. *International Monetary Fund* pada Oktober 2022 memproyeksi perekonomian dunia pada 2023 turun menjadi 2,7 persen dibandingkan proyeksi awal sebesar 2,9 persen. Kondisi ini disinyalir akibat masih tingginya tingkat bunga dibeberapa negara seperti Eropa, Inggris, China dan Jepang yang disertai kenaikan tingkat bunga. Tingginya inflasi dan tingkat bunga tersebut, tentunya menjadi gunjangan terhadap rantai pasokan atau meningkatkan biaya produksi dalam negeri yang sebagian besar impor dari negara – negara tersebut khususnya sektor manufaktur.

Struktur perekonomian Kabupaten Majalengka didominasi oleh beberapa sektor seperti pertanian, perdagangan, pengolahan (manufaktur). Sektor manufaktur merupakan sektor yang memiliki kontribusi paling besar terhadap srtuktur perekonomian daerah yaitu 23,28 persen dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 43,92 persen dari total angkatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2022). Kenaikan upah yang diberlakukan per 1 Januari 2023, tentunya akan berpotensi mendorong kenaikan harga – harga barang secara umum, yang pada akhirnya meningkatkan pengangguran. *Trade off* antara inflasi, upah dan pengganguran ini umumnya terjadi dalam jangka pendek, namun akan menjadi masalah dalam jangka panjang, jika tidak diimbangi dengan intervensi kebijakan yang efektif dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pengangguran yang tinggi merupakan kemunduran bagi perekonomian daerah dan akan berdampak negatif jika tidak ditangani dengan baik. Sehingga untuk periode jangka panjang akan meningkatkan kemiskinan secara tidak langsung. Penanganan pengangguran yang dilakukan saat ini umumnya tidak menyelesaikan akar permasalahan. Kebijakan pemerintah seperti pemberian kesehatan gratis, bantuan biaya pendidikan, beras miskin, subsidi rumah murah adalah untuk mendorong agar pengangguran dan kemisnikan dapat berusaha secara mandiri untuk mengembangkan usaha atau bisnis sendiri. Kebijakan lainnya adalah penetapan upah minimum baik ditingkat provinsi maupun daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Namun riilnya pengangguran masih tinggi, yang dapat dilihat dari jumlah gelandangan, pengemis dan pengamen yang tidak pernah dapat terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh jangka pendek dan jangka panjang inflasi dan upah terhadap pengangguran di Kabupaten Majalengka.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara meluas dan berkelanjutan. Yang pertama adalah inflasi tumbuh secara umum, dan yang kedua adalah terus menerus (Astiyah dan Suseno, 2012). Jika inflasi mencakup kenaikan harga, maka kenaikan harga tersebut adalah harga secara umum. Menurut (Mankiw, 2019), asal-usul inflasi dibagi menjadi tiga kategori: inflasi tarikan permintaan, inflasi dorongan biaya, dan inflasi impor. Inflasi tarikan permintaan terjadi ketika permintaan agregat naik tetapi keadaan produksi tetap stabil. Inflasi tekanan biaya adalah inflasi yang terjadi ketika tingkat penawaran lebih rendah dari tingkat permintaan. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga komponen produksi yang memaksa produsen untuk membatasi produksi hingga tingkat tertentu. Karena kenaikan biaya manufaktur, pasokan keseluruhan terus menurun. Jika kondisi ini terus berlanjut, inflasi akan terjadi, diikuti dengan resesi. Inflasi impor terjadi akibat kenaikan harga impor. Inflasi ini akan berkembang jika barang-barang impor yang menimbulkan kenaikan harga berperan penting dalam kegiatan belanja dunia usaha.

Upah

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, 2021), Pasal 1 angka 1, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja. pekerja/buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah adalah penghasilan yang diterima pekerja berupa uang, yang meliputi tidak hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan yang diterima secara rutin/berkala (tunjangan transport, tunjangan makan, dan tunjangan lainnya sepanjang diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk tunjangan hari raya (THR), tunjangan tahunan, triwulanan, tunjangan non -tunjangan rutin, dan tunjangan alam (Badan Pusat Statistik, 2022). Bagi pengusaha upah adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak menjadi terlalu tinggi agar keuntungannya menjadi lebih tinggi. Bagi organisasi pekerja/buruh upah adalah objek yang menjadi perhatiannya untuk dirundingkan dengan pengusaha agar dinaikkan. Bagi pekerja/buruh upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi adalah jumlah barang kebutuhan hidup yang dapat pekerja beli dari jumlah upah itu.

Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah berada di lapangan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat gaji tertentu tetapi tidak dapat memperolehnya (Sukirno, 2018). Menurut (Mankiw, 2019), pengangguran didefinisikan sebagai tenaga kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak efisien. Pengangguran dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk yaitu pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, setengah pengangguran, dan pengangguran terbuka. Pengangguran tersembunyi adalah keadaan di mana karyawan melakukan kegiatan ekonomi melebihi apa yang dibutuhkan. Pengangguran musiman mengacu pada pengangguran pada musim-musim tertentu dalam setahun, seperti untuk petani. Petani dianggap sebagai pekerja musiman karena mereka belum tentu bekerja sepanjang tahun. Setengah pengangguran adalah sejenis pengangguran di mana seseorang bekerja jauh lebih sedikit daripada jam kerja standar. Pekerjaan tipikal membutuhkan 40 jam per minggu, atau 5/6 hari seminggu. Seorang pekerja dianggap setengah menganggur jika dia

bekerja tidak lebih dari 20 jam per minggu atau tiga hari per minggu. Pengangguran terbuka terjadi ketika seorang pekerja bekerja jauh lebih sedikit daripada jam kerja biasanya. Seorang pekerja dianggap pengangguran terbuka jika dia bekerja kurang dari satu hari atau tidak bekerja sama sekali.

Hubungan Inflasi, Upah dan Pengangguran

(Mankiw, 2019), kurva Phillips menggambarkan hubungan antara inflasi, upah, dan pengangguran. Kurva Phillips menggambarkan hubungan negatif antara perubahan tingkat gaji, inflasi, dan pengangguran. Karena hubungan terbalik antara tingkat inflasi dan pendapatan yang tinggi, pengangguran diminimalkan. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang meningkat berhubungan dengan penurunan upah dan tingkat inflasi. Hasil penelitian Jelivov dan Josep (2016), menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap pengangguran di Nigeria dalam jangka pendek (Mukherjee, 2019). Hasil ini serupa dengan penelitian Rubbe Sigh (2018), yang juga menunjukkan inflasi memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap pengangguran di India (Singh, 2018). Di Indonesia, penelitian Dita Dewi Kuntiarti (2018) menemukan bahwa walaupun inflasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran, sedangkan gaji berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Banten antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 (Kuntiarti, 2018).

Hasil berbeda diperoleh dari penelitian Rizka Febiana (2017), yang menemukan bahwa inflasi dan gaji memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Banten antara tahun 2009-2013 (Putri, 2015). Temuan ini sejalan dengan penelitian Edwin Basmar dan Rahmat (2020) yang menemukan bahwa gaji memiliki pengaruh negatif dalam jangka pendek tetapi memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang terhadap pengangguran di Indonesia (Angraeni et al., 2019) . Dalam penelitian Kaufman (2020), kenaikan upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di negara bagian Amerika dari tahun 1990 hingga 2015, khususnya di kalangan pengangguran dengan tingkat pendidikan di bawah atau setara dengan sekolah menengah (Kaufman Jhon A, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu menggunakan angka – angka, karena objek analisis penelitian ini adalah inflasi, upah dan pengangguran di Kabupaten Majalengka selama periode 2008 – 2022. Data sekunder diperoleh dari arsip – arsip yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka.

Metode analisis yang digunakan adalah Metode Koreksi Kesalahan (*Error Correction Model*). (Widarjono, 2018), metode ECM digunakan karena mempunyai kemampuan untuk menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek dan jangka panjang serta mengkaji konsisten atau tidaknya model empirik dengan teori ekonomi. Selain itu penggunaan metode ECM dalam penelitian ini didasarkan pada data penelitian yang berbentuk *time series* yang seringkali tidak stasioner sehingga menyebabkan hasil regresi meragukan atau disebut juga dengan regresi lancing (palsu). Tahapan uji yang dilakukan meliputi :

1. Uji Stasioneritas

   Salah satu konsep penting dalam teori ekonometrika adalah anggapan stasioneritas. Secara statistik sebuah data time series dapat dikatakan stasioner apabila rata – rata dan varians data tersebut konstan dari waktu ke waktu dan nilai kovarian diantara dua periode waktu tergantung hanya pada jarak atau kelambanan antara dua periode waktu tersebut, bukan saat dihitungnya kovarian. Selain itu adanya data yang terlalu besar selama periode

pengamatan akan mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata - ratanya. Pada penelitian ini, uji stasioneritas dilakukan dengan menggunakan metode *Augmented Dickey-Fuller Test* (ADF).

2. Uji Kointegrasi
   Pendekatan kointegrasi berkaitan erat dengan pengujian terhadap adanya kemungkinan hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel – variabel ekonomi. Kointegrasi meru- pakan suatu hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel – variabel yang tidak stasioner dan residual dari kombinasi linear tersebut harus stasioner. Metode yang digunakan untuk uji kointegrasi pada penelitian ini adalah metode uji akar unit *Augmented Dickey-Fuller Test* (ADF).
3. Uji *Error Correction Model* (ECM)
   Estimasi *Error Correction Model* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Estimasi model koreksi kesalahan Domowitz-El Badawi. ECM mempunyai ciri khas dengan dimasukkannya unsur *Error Correction Term* (ECT). Menurut model ini, model ECM valid apabila tanda koefisien ECT bertanda positif dan signifikan secara statistik. Spesifikasi umum ECM adalah sebagai berikut :

$$\Delta_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta X_t + \beta_2 \Delta X_{t-1} + \beta_3 ECT$$

Dalam model, nilai koefisien ECT antara nol sampai dengan satu ($0<\beta<1$). Koefisien jangka pendek dari persamaan model ECM direpresentasikan oleh koefisien β_1, sedangkan untuk memperoleh besaran koefisien regresi jangka panjang dengan menggunakan model ECM, maka digunakan rumus :

$$\text{Konstanta} = \beta_0 / \beta_3 \; Xt = (\beta_2 + \beta_3) / \beta_3$$

Model persamaan ECM pada penelitian ini adalah :

$$\Delta TPT_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta INF_t + \beta_2 \Delta WAGE_t + \beta_3 INF_{t-1} + \beta_4 WAGE_{t-1} + \beta_5 ECT + U_t$$

Keterangan :

TPT_t	:	Tingkat pengangguran terbuka pada periode ke-t
INF_t	:	Inflasi pada periode ke-t
$WAGE_t$	:	Upah pada periode ke-t
ΔTPT_t	:	$TPT_t - TPT_{t-1}$
ΔINF_t	:	$INF_t - INF_{t-1}$
$\Delta WAGE_t$	:	$WAGE_t - WAGE_{t-1}$
ECT	:	*Error Correction Term*
β_0	:	Konstanta
$\beta_0 - \beta_5$	:	Koefisien masing – masing variabel bebas
U_t	:	Error pada periode t

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Stasioneritas

Model regresi data *time series* seringkali digunakan untuk peralaman atau prediksi. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam data runtut waktu adalah data tidak stasioner, sehingga hasil prediksi menjadi tidak valid. Stasioneritas adalah kondisi dimana data runtut waktu memiliki distribusi mean, varians dan kovariansnya tetap konstan sepanjang waktu. Hasil uji stasioner dengan metode *Augmented Dickey Fuller* pada level dengan mengikutsertakan konstanta dan intersep pada derajat kepercayaan 95 persen, menunjukkan bahwa semua variabel (inflasi, upah dan pengangguran) memiliki stasioneritas karena *probability* dibawah 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa data runtut waktu yang digunakan dalam penelitian ini memiliki syarat stasioneritas yang baik dan dapat digunakan untuk

pengujian lanjutan berupa peralaman jangka panjang dan jangka pendek. Hasil uji stasioneritas *Augmented Dickey-Fuller* disajikan pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Hasil Uji Stastioner *Augmented Dickey- Fuller*

Method	Statistic	Prob
ADF - Fisher Chi-square	22.1389	0.0011
ADF - Choi Z-stat	-2.61071	0.0045

Sumber : Hasil Output Eviews 10

Uji Kointegrasi

Kointegrasi merupakan kondisi dimana dua variabel acak masing-masing adalah *random walk* atau tidak stasioner, tetapi kombinasi linier antara dua variabel tersebut merupakan *time series* yang stasioner (Widarjono, 2018). Dapat dikatakan, bahwa dua variabel terkointegrasi jika kedua variabel acak tersebut memiliki pergerakan bersama-sama dengan pola yang sama meskipun kedua variabel merupakan *random walk* atau acak. Pergerakan bersama tersebut dimaknai sebagai pergerakan menuju kondisi keseimbangan dalam jangka panjang. Hal ini dapat diartikan bahwa dua variabel terkointegrasi jika kedua variabel tersebut memiliki hubungan jangka panjang atau keseimbangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika sejumlah variabel memiliki keseimbangan dalam jangka panjang dan saling berintegrasi pada periode yang sama maka variabel tersebut dikatakan saling berkointegrasi.

Studenmund, (2016), sejumlah variabel yang memiliki kointegrasi, maka kondisi regresi palsu dapat dihindari kendati variabel terikat dan paling sedikit satu variabel bebas dalam kondisi yang tidak stasioner (Buhaerah, 2017). Pengujian kointegrasi dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Augmented Dickey-Fuller*, disajikan pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Hasil Uji Kointegrasi *Augmented Dickey-Fuller*

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-4.414370	0.0062
Test critical values:	1% level	-4.121990	
	5% level	-3.144920	
	10% level	-2.713751	

Sumber : Hasil Output Eviews 10

Hasil uji kointegrasi pada level dengan uji akar unit *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) dengan derajat kepercayaan 95 persen menunjukkan nilai probability dibawah 0,05, hasil ini memberi arti bahwa semua variabel yang diteliti terkointegrasi. Artinya terdapat hubungan jangka panjang antara inflasi, upah dan pengangguran. Sehingga model regresi OLS yang digunakan bisa tetap menggunakan nilai pada setiap level.

Uji *Error Correction Model* (ECM)

Secara umum jika dua variabel atau lebih memiliki kointegrasi, maka variabel-variabel tersebut memiliki hubungan jangka panjang. Faktanya, setiap perekonomian dapat terjadi guncangan yang mempengaruhi hubungan antar variabel menjadi tidak seimbang (*disequilbrium*). Dalam arti lain, jika terdapat guncangan jangka pendek dalam perekonomian, besar kemungkinan terdapat ketidakseimbangan antar variabel yang sudah terkointegrasi. Konsep inilah yang menjadi dasar model koreksi kesalahan (ECM) digunakan untuk mendeteksi

tingkat kemampuan atau besar dan cepatnya penyesuaian jangka pendek antar variabel yang terkointegrasi menuju kondisi keseimbangan kembali. Hasil uji model koreksi kesalahan (ECM) model Domowith – El Badawi disajikan pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Model Koreksi Kesalahan (ECM) Model Domowitz - El Badawi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	2.485740	2.482003	1.001506	0.3459	-
D(INF)	0.481829	0.115272	4.179931	0.0001	Signifikan
D(WAGE)	-0.350495	0.103063	-3.396435	0.0002	Signifikan
INF	-0.112038	0.030200	-3.709868	0.0006	Signifikan
WAGE	-0.300111	0.098705	-3.040484	0.0006	Signifikan
ECT	1.171816	0.306454	3.823794	0.0051	Signifikan
R-squared	0.773374		F-statistic		5.460099
			Prob(F-statistic)		0.017645

Sumber : Hasil Eviews 10, diolah

Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat disusun persamaan model ECM Domowitc – El Badawi sebagai berikut :

D(TPT) = 2,485740 + 0,481829D(INF) – 0,350495D(WAGE) – 0,112038INF – 0,300111WAGE + 1,171816ECT + *e*

Model ECM Domowitc – El Badawi dikatakan valid jika memiliki koefisien ECT bertanda positif dan signifikan secara statistik (Widarjono, 2018). Dengan demikian, hasil uji model ECM yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. Nilai koefisien ECT dapat mempengaruhi seberapa cepat atau lambat keseimbangan dapat tercapai kembali jika terjadi guncangan dalam perekonomian. Nilai koefisien ECT yang diperoleh sebesar 1,1718 mempunyai makna bahwa perbedaan antara nilai aktual variabel pengangguran dengan nilai keseimbangan sebesar 1,1718 akan disesuaikan paling cepat dalam kurun waktu 1 tahun 2 bulan. Dapat diartikan juga bahwa 1,1718% dari ketidaksesuaian yang dapat dikoreksi dalam jangka pendek terhadap jangka panjang paling cepat selama 1 tahun 2 bulan.

Nilai R-Squared yang diperoleh sebesar 0,773374, artinya 77 persen variasi pengangguran di Kabupaten Majalengka dapat dijelaskan oleh inflasi dan upah, sementara 23 persen dijelaskan oleh variabel – variabel lain diluar model. Nilai F-statistik yang diperoleh sebesar 5,460099 dengan probability 0,017645 < 0,05, artinya model yang digunakan memiliki signifikasi statistik untuk menjelaskan pengangguran di Kabupaten Majalengka dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Model ECM Domowitc – El Badawi dalam penelitian ini juga memenuhi asumsi klasik tehnik estimasi *ordinary least square* (OLS), sebagaimana disyaratkan dalam model regresi pada umumnya. Ringkasan hasil uji asumsi klasik disajikan pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Metode	Nilai Statistik (Prob)	Keterangan
Linieritas	Ramset Reset (2)	0,1948 (0,8279)	Linier
Normalitas	Jarque-Bera	3,0583 (0,2167)	Normal
Heterokedastisitas	Glejser	0,2095 (0,9490)	Tidak Ada Heterokedastisitas
Autokorelasi	LM (2)	2,4784 (0,2896)	Tidak Ada Autokorelasi

Sumber : Hasil Eviews 10, diolah

Nilai koefisien konstanta jangka pendek sebesar 2,4857 dan bertanda positif, artinya tanpa adanya pengaruh dari inflasi dan upah, pengangguran di Kabupaten Majalengka akan bernilai sebesar 2,4857 persen. Adapun hasil perhitungan koefisien jangka panjang disajikan tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5. Koefisien Jangka Panjang

Variabel	Rumus	Perhitungan	Koefisien
Konstanta	$(\beta_0 + \beta_5)/\beta_5$	(2,485740+1,171816)/1,171816	3,121272
Inflasi (Inf)	$(\beta_3 + \beta_5)/\beta_5$	(-0,112038+1,171816)/1,171816	0,904389
Upah (Wage)	$(\beta_4 + \beta_5)/\beta_5$	(-0,300111+1,171816)/1,171816	0,743892

Sumber : Hasil Eviews 10, diolah

Nilai koefisien konstanta jangka panjang sebesar 3,1212 dan bertanda positif, artinya tanpa adanya pengaruh dari inflasi dan upah, pengangguran di Kabupaten Majalengka akan bernilai sebesar 3,1212 persen. Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana disajikan pada tabel 3 dan tabel 4, dapat dijelaskan hasil temuan penelitian ini sebagai berikut :

Pertama, inflasi dalam jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Nilai koefisien inflasi jangka pendek sebesar 0,4818, artinya setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen akan memicu kenaikan penganguran sebesar 0,4818 persen. Hasil ini sejalan dengan teori siklus bisnis klasik yang mengemukakan bahwa dalam jangka pendek inflasi dapat menyebabkan terjadinya *intemporary labour*, yaitu suatu kondisi dimana tenaga kerja secara sukarela memilih untuk tidak bekerja (menganggur) sementara waktu karena memiliki anggapan bahwa meluangkan waktu untuk bersantai atau memilih tidak bekerja lebih baik dari pada harus bekerja karena upah yang diperoleh tidak dapat menutupi biaya untuk kebutuhan hidup akibat meningkatnya harga – harga barang secara umum (Mankiw, 2019). Hasil ini berbeda dengan penelitian Sri Yuni Bintang dan Riandani Rezki (2020), yang menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif dalam jangka pendek namun tidak signifikan terhadap pengangguran di Kota Medan selama tahun 2007-2017 (Bintang & Prana, 2020).

Sebaliknya dalam jangka panjang, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penganguran. Koefisien inflasi jangka panjang sebesar 0,9043, artinya kenaikan inflasi mendorong menurunnya pengangguran sebesar 0,9043 persen. Dalam jangka panjang, inflasi dan pengangguran memiliki hubungan terbalik atau negatif, yang dikenal sebagai kurva Phillips (Mankiw, 2019). Hubungan ini menyatakan bahwa ketika inflasi meningkat, pengangguran menurun, dan sebaliknya. Namun, hubungan yang tepat antara inflasi dan pengangguran dalam jangka panjang dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti kebijakan moneter dan fiskal, kondisi ekonomi global dan daerah, serta penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar tenaga kerja. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizka Febiana Putri (2017), yang juga membuktikan bahwa inflasi dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013.

Kedua, upah dalam jangka pendek dan jangka panjang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Koefisen upah jangka pendek sebesar -0.3504, artinya kenaikan upah 1 persen akan menurunkan penganguran sebesar 0,3504 persen. Mankiw (2019), Kurva Philips menunjukkan dalam jangka pendek ada hubungan terbalik antara upah dan pengangguran. Ketika pengangguran tinggi, upah cenderung rendah, dan ketika pengangguran rendah, upah cenderung tinggi. Hal ini karena ketika pengangguran tinggi, ada

kelebihan pasokan tenaga kerja, menyebabkan harga tenaga kerja (upah) turun. Ketika pengangguran rendah, permintaan tenaga kerja melebihi penawaran, menyebabkan harga tenaga kerja (upah) naik. Dengan kata lain, ketika pengangguran rendah, pemberi kerja menghadapi persaingan yang lebih tinggi untuk mempekerjakan pekerja, yang mengarah pada peningkatan upah. Sebaliknya, ketika pengangguran tinggi, ada surplus pekerja, memberikan pengusaha lebih banyak daya tawar dan menghasilkan upah yang lebih rendah. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Edwin Basmar dan Rachmat Sugeng (2020), yang menunjukkan bahwa upah dalam jangka pendek memiliki pengaruh negatif dan signifikan di Indonesia tahun 2009-2019.

Nilai koefisien upah jangka panjang sebesar -0,7438. Artinya kenaikan upah sebesar 1 persen, akan mendorong menurunnya pengangguran sebesar 0,7438 persen. Dalam jangka panjang, hubungan antara upah dan pengangguran digambarkan oleh kurva Phillips, yang menunjukkan bahwa ada hubungan terbalik antara keduanya. Ketika pengangguran menurun, pertumbuhan upah biasanya meningkat, dan ketika pengangguran meningkat, pertumbuhan upah biasanya menurun. Ketika upah tinggi, perusahaan lebih cenderung mempekerjakan pekerja, yang mengarah ke pengangguran yang lebih rendah. Sebaliknya, ketika upah rendah, perusahaan cenderung tidak mempekerjakan pekerja, yang mengakibatkan pengangguran yang lebih tinggi (Mankiw, 2019). Dengan kata lain, ketika pengangguran menurun, permintaan tenaga kerja meningkat dan oleh karena itu upah cenderung naik. Sebaliknya, ketika pengangguran tinggi, ada surplus tenaga kerja dan upah cenderung lebih rendah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita Dewi Kuntiarti (2018), Kaufman Jhon A et al (2020), yang juga membuktikan bahwa dalam jangka panjang, upah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.

SIMPULAN

Hasil uji stasioneritas menunjukkan bahwa inflasi, upah dan pengangguran memiliki stasioneritas pada level. Hasil uji kointegrasi juga menunjukkan bahwa inflasi dan upah memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengangguran dalam jangka panjang. Dengan menggunakan model ECM Domowith-El Badawi, diperoleh hasil bahwa inflasi dalam jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan dalam jangka panjang inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa inflasi masih menjadi permasalahan atau gunjangan bagi perekonomian khususnya dalam jangka pendek. Oleh karenanya, diperlukan campur tangan pemerintah daerah untuk dapat mengendalikan inflasi jangka pendek misalnya mendorong produktifitas tenaga kerja, khususnya industri manufaktur yang padat karya di Kabupaten Majalengka. Peningkatan permintaan untuk produk dan layanan padat karya, akan mengarah ke pekerjaan dan upah yang lebih tinggi. Peningkatan daya beli bagi pekerja, akan mengarah pada peningkatan permintaan barang dan jasa.

Upah dalam jangka pendek dan jangka panjang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika upah yang ditetapkan terlalu tinggi, maka akan dapat menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja, yang mengakibatkan pengangguran yang lebih tinggi. Disamping itu, upah yang tinggi menyebabkan perusahaan menghadapi biaya tenaga kerja yang tinggi pula, sehingga membuat produk atau layanan perusahaan menjadi lebih mahal. Akibatnya, perusahaan dapat mengurangi jumlah pekerja yang mereka pekerjakan, yang mengarah ke pengangguran yang lebih tinggi. Oleh karenanya, penting untuk menjaga dampak upah terhadap pengangguran dalam jangka

pendek dan jangka panjang sesuai kondisi ekonomi makro setiap daerah seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Diperlukan kesepakatan bersama antara pekerja, pemerintah dan pengusaha untuk mempertahankan upah pada tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja sehingga dapat membantu meminimalkan dampak negatif upah terhadap pengangguran dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Angraeni, Baharuddin, & Mattalatta. (2019). Respon Fluktuasi Tingkat Upah Terhadap Perubahan Tingkat Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Mirai Managemnt*, *4*(2), 122–136. https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai

Astiyah dan Suseno. (2012). *Inflasi*. Bank Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Sektoral Kabupaten Majalengka Tahun 2021*.

Bintang, S. Y., & Prana, R. R. (2020). Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Medan. *Civitas: Jurnal Studi Manajemen*, *2*(2), 97–100. https://journals.synthesispublication.org/index.php/civitas/article/view/156

Buhaerah, P. (2017). Pembangunan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, *1*(2), 165–180. https://doi.org/10.31685/kek.v1i2.203

Kaufman Jhon A. (2020). Effect of Increasing Minimum Wage by Unemployment Rate on Suicide in The USA. *Journal Epidemiol Community Health*, *1*(1). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31911542/

Kuntiarti, D. D. (2018). Pengaruh inflasi, jumlah penduduk dan kenaikan upah minimum terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, *7*(1), 1–9.

Mankiw, N. G. (2019). *Pengantar Ekonomi Makro*. Salemba Empat.

Mukherjee, A. K. (2019). The impact of inflation on unemployment in Indian economy. *International Journal of Educational Research and Development*, *1*(4), 56–61.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan*. *53*(9), 6.

Putri, R. F. (2015). Analisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah terhadap pengangguran terdidik. *Economics Development Analysis Journal*, *4*(2), 175–181. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/art

Samuelson A. P. (2014). *Ilmu Makro Ekonomi*. PT. Media Global Edukasi.

Singh, R. (2018). Impact of GDP and Inflation On Unemployment Rate : A Study of Indian Economy In 2011-2018. *International Journal of Management, IT & Enginering*, *8*(3). https://www.atlantis-press.com/article/125954222.pdf

Sukirno, S. (2018). *Makro Ekonomi*. Grafindo Persada.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika untuk Ekonomi dan Bisnis, Teori dan Aplikasi*. Ekonisia.